

## **PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2003 TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN BENER MERIAH**

**Alzikri Fakhurraji, Afdalul Magfirah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

Email : alzikri.ugp@gmail.com

### **ABSTRAK**

Reformasi 1998 mendorong terjadinya desentralisasi yang lebih luas. Banyak daerah mengusulkan untuk terjadinya pemekaran. Salah satu yang lahir adalah Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Pemekaran melahirkan pertanyaan apakah dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan melihat pengaruh pemekaran kabupaten (x) pembangunan (y). Hasil penelitian menunjukkan pemekaran berpengaruh signifikan terhadap kesehatan, pengetahuan dan hidup layak Masyarakat Kabupaten Bener meriah, hal ini terlihat dari Kesehatan terus mengalami peningkatan. Pendidikan mengalami peningkatan seperti infrastruktur, jumlah tenaga pengajar hingga tingkat partisipasi sekolah. Selanjutnya Pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan pengeluaran, kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Pengaruh, Pembangunan, Kabupaten Bener Meriah.

### **ABSTRACT**

*The 1998 reforms led to broader decentralization. Many regions have proposed pemekaran. One of those that was born was Bener Meriah Regency through Law Number 41 of 2003. The expansion raises the question of whether it can have an influence on the welfare of the community. The method used in this research is quantitative method. By looking at the effect of district expansion (x) development (y). The results showed that the expansion had a significant effect on health, knowledge and a decent life for the people of Bener Regency. This was evident from the continuous improvement in health. Education has increased such as infrastructure, the number of teaching staff to the level of school participation. Furthermore, community income increases, expenditure ability, land ownership.*

*Keywords : Influence, Development, Kabupaten Bener Meriah.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi demografi dan geografis yang bervariasi untuk setiap daerah di Indonesia menyebabkan perbedaan karakteristik yang mendalam pada bangsa ini. Indonesia telah menjalani berbagai pola dan sistem dalam menjalankan pemerintahannya. Seiring berjalannya waktu Indonesia tiba pada kondisi dimana daerah diberikan keleluasaan dan hak untuk mengelola daerahnya sendiri dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Setelah era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 Indonesia berada pada kondisi dimana pemerintah pusat tidak lagi menjadi sentral seluruh kebijakan yang ada di daerah melainkan diserahkan langsung kepada daerah. Dalam undang-undang Pemerintah Daerah yang terbaru pemerintah pusat hanya bertindak sebagai peninjau yang diikat dengan undang-undang. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mampu menjawab kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang untuk mengelola daerahnya secara efektif kegiatan.

Memasuki era reformasi dan terjadinya amandemen terhadap undang-undang dasar maka diikuti dengan lahirnya undang-undang yang mencegah kembali terjadinya sentralistik pemerintahan. Salah satu dari produk undang-undang ini adalah lahirnya banyak pemerintahan di daerah baru baik itu berbentuk provinsi kabupaten hingga daerah otonom terendah. Tentunya Hal ini bertujuan agar daerah yang lebih paham dengan kondisi geografisnya dapat memaksimalkan potensinya tanpa harus mengambil kewenangan pemerintah pusat seperti Urusan Agama urusan luar negeri pertahanan dan keamanan hingga kebijakan fiskal. Desentralisasi perlu untuk dilaksanakan di beberapa daerah untuk

mengurangi ketimpangan karena dengan desentralisasi kebutuhan akan lebih mudah untuk diketahui.<sup>1</sup>

Pemekaran daerah secara masif terjadi di tahun 1999 dan kemudian diikuti dengan tahun 2003. Salah satu pemekaran yang terjadi setelah 2003 adalah pemekaran kabupaten Bener Meriah yang secara geografis terletak di pedalaman wilayah tengah Aceh<sup>2</sup>. Kabupaten Bener Meriah sebagai kabupaten muda di antara kabupaten lain di Provinsi Aceh hingga tahun 2019 sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Dasarnya adalah undang-undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh dan resmi pada tanggal 7 Januari 2004. Pemekaran pada hakekatnya memiliki tujuan yang harus tercapai sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana pemerintahan yang baru nanti akan berlangsung dan apa dampaknya kepada masyarakat ketika pemekaran itu telah diwujudkan.

Dimekarkannya Kabupaten tersebut pada tahun 2004 memunculkan dugaan apakah pemekaran tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah atau tidak. Hal inilah yang membuat perlunya dilakukan suatu penelitian mengenai pengaruh pemekaran terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan memunculkan dua pertanyaan apakah terdapat pengaruh antara pemekaran Kabupaten Bener Meriah terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian seberapa besar pengaruh tersebut. Salah satu yang dapat menjadi acuan tingkat kesejahteraan dapat dilihat

---

<sup>1</sup> Balkar, B., & M. G. Kasurka, 2015, *Decentralization as an Educational Planning Strategy in Turkish Education System*, International Journal of Education, hlm 415-436.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Bener Meriah

dari aspek pembangunan yaitu kriteria yang ditawarkan oleh United Nations development programme (UNDP), dimana pada tahun 1990-an membuat tiga kriteria dalam pembangunan manusia diantaranya adalah kesehatan, pengetahuan dan hidup layak<sup>3</sup>. Meskipun dalam perkembangannya UNDP menambahkan satu kriteria lagi yaitu pembangunan manusia namun hal ini dirasa telah mencakup kedalam kriteria pendidikan<sup>4</sup>.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh di implementasikannya undang-undang nomor 41 tahun 2003 terhadap terhadap pembangunan Kabupaten Bener Meriah, jika dilihat dari aspek pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari jawaban korelasional Variable Pemekaran terhadap Variable Kesejahteraan dan melihat kekuatan hubungan antar variabel dengan menggunakan analisis kuantitatif. Sebagaimana Creswell mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif pada hakikatnya menuntut peneliti untuk menjawab bagaimana sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lain<sup>5</sup>. Adapun definisi operasionalnya dari Variabelnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepentingan pemekaran kabupaten Bener Meriah berkaitan dengan terselesaikannya masalah yang dimiliki oleh kabupaten tersebut
2. Apakah pemekaran ini ini dapat berimplikasi terhadap wilayah kerja pemerintahan yang dapat dijangkau masyarakat
  - a. Bagian wilayah kerja

<sup>3</sup> UNDP, 1990, *Human Development Report*, New York : UNDP.

<sup>4</sup> UNDP, 2019, *Human Development Report 2019*, <http://hdr.undp.org/en/2019> Report Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2020.

<sup>5</sup> Creswell, John W, 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 13

Merupakan wilayah yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat serta memiliki pembatasan lingkup wilayah kerja pemerintahan baik itu terdiri dari tingkat kecamatan hingga kampung

b. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana maupun prasarana yang yang mencukupi dan layak, ditunjukkan dengan adanya bangunan fasilitas layanan masyarakat, akses transportasi yang baik, sarana komunikasi yang sudah mencakup keseluruhan wilayah, fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemerintah pelayanan maupun kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Bener Meriah

Variabel terikat yang diteliti dalam hal ini adalah kejahatan masyarakat. Indikator kegiatan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai berikut :

1. Kesehatan

Ketersediaan dan kecukupan kesehatan yang mana didalamnya mencakup sarana, ketersediaan tenaga kesehatan, kecukupan konsumsi masyarakat, ketersediaan penyuluh kesehatan hingga rendahnya tingkat kematian bayi sehingga total jumlah penduduk yang mengidap penyakit

2. Pendidikan

Pendidikan yang mana didalamnya memuat tingkat partisipasi sekolah tingkat kelulusan sekolah tingkat buta huruf keberadaan fasilitas pendidikan hingga kecukupan tenaga pengajar wilayah terluar

3. Pengeluaran per penduduk

Meliputi angkatan kerja, jumlah pengeluaran bahan-bahan makanan hingga bahan-bahan yang bukan makanan dalam suatu wilayah.

Populasi pada penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang berada di Provinsi Aceh yang terdiri dari 10 Kecamatan. Sementara itu sampel dalam penelitian ini yaitu diawali dengan cara

melakukan Cluster random sampling dengan mengklasifikasi wilayah kecamatan kedalam 3 spesifikasi yang pertama wilayah kecamatan yang mewakili kecamatan dengan status kampung maju terbanyak, yang kedua kecamatan dengan mayoritas status Kampung berkembang dan yang ketiga kecamatan dengan jumlah Kampung Tertinggal terbanyak. Total sampel dari ketiga Kecamatan berjumlah seratus orang.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Pengelolaan Pariwisata Alam dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah**

Kabupaten Bener Meriah yang merupakan objek penelitian ini, memiliki luas wilayah 188.870,70 ha, di antara wilayahnya terdiri dari 21.604,79 ha merupakan hutan lindung. Hutan produksi, seluas 36.448 ha, kebun kopi 39.490,01 ha, areal persawahan 21.243 ha, padang rumput pengembalaan 10.241 ha, tegalan 9.070 ha, pekarangan/bangunan 3.712 ha ladang 11'186 ha, tanah terlantar 1.400 ha, kolam/perikanan 63 ha dan lain-lain seluas 1.354,22 Ha. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diresmikan tanggal Delapan Belas Desember Dua Ribu Tiga, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 yang diterbitkan pada Tahun 2003, dengan ibukotanya Redelong. Daerah ini berada pada posisi 4° 33' 50" s/d LU 96° 40' 75" s/d 97° 17' 50" BT, dengan batas wilayahnya sebagai berikut :

- a) Mengarah ke utara berbatasan dengan Kabupaten Bireuen/ Aceh Utara.
- b) Mengarah ke selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah
- c) Mengarah ke barat dengan wilayah Kabupaten Aceh Tengah
- d) Mengarah ke timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Aceh Timur

Tingkat kemiringan lahan, yaitu datar 0-2 persen, bergelombang 2-5 persen, curam 15-40 persen dan sangat curam mencapai lebih dari 40 persen, dengan ketinggian (DPL) diatas permukaan laut rata-rata mencapai 100-2500 m. Suhu rata-rata berkisar antara 19-26<sup>0</sup> C, dengan kelembaban udara berada

antara 40-60 persen dan curah hujan rata-rata 1800-2300 mm/tahun, Hujan berkisar antara 143-178 Hari/tahun.

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap variabel bebas yaitu pemekaran, dapat kita ketahui bahwa tabel distribusi frekuensi untuk variabel bebas yaitu pemekaran dengan responden 100 orang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Bebas dari 100 Responden**

Jumah Nilai Jawaban	Katagori	Frekuensi	Persentase
20-25	Sangat Rendah	5	5%
26-31	Rendah	15	15%
32-37	Sedang	22	22%
38-43	Tinggi	24	24%
44-49	Sangat Tinggi	34	34%
Jumlah		100	100%

Merujuk pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya pemekaran Kabupaten Bener Meriah berada pada posisi sangat tinggi yaitu sesuai dengan urgensi, relevansi dan menyangkut wilayah kerja beserta sarana dan prasarana yaitu dengan persentase 34%, pemekaran Kabupaten Bener Meriah berada pada posisi tinggi 24%, pemekaran Kabupaten Bener Meriah berada pada posisi 22%, pemekaran Kabupaten Bener Meriah berada pada posisi rendah 15% dan yang menjawab pemekaran Kabupaten Bener Meriah berada pada posisi sangat rendah 5%.

Berdasarkan data diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemekaran Kabupaten Bener Meriah yang sesuai dengan urgensi, relevansi dan menyangkut wilayah kerja beserta sarana dan prasarana berada pada posisi sangat tinggi dengan persentase sebesar 34%. Berdasarkan kuisisioner yang dibagikan pada responden, maka variabel kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga indikator yang didasarkan pada indikator pembangunan

manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita. Adapun distribusi frekuensi nilai atas jawaban responden untuk variabel kesejahteraan masyarakat dengan 100 responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Terikat Kesejahteraan Masyarakat**

Jumah Nilai Jawaban	Katagori	Frekuensi	Persentase
41-48	Sangat Rendah	5	5%
49-56	Rendah	19	19%
57-64	Sedang	26	26%
65-72	Tinggi	35	35%
73-80	Sangat Tinggi	15	15%
Jumlah		100	100%

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 100 responden, 5% menyatakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah berada pada posisi sangat rendah, 19% responden menyatakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah rendah, 26% menyatakan sedang, 35% menyatakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah tinggi dan 15% kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah sangat tinggi. Selain itu pada masing-masing indikator juga dapat kita lihat bahwa dari angka harapan hidup, dimana pada awal pemekaran tahun 2004 berada pada angka 65,8 kemudian bergerak menjadi 67,69 pada tahun 2011. Selain angka harapan hidup, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah juga dapat kita lihat pada angka melek huruf yang pada tahun 2004 berada pada 96,0 menjadi 98,79 pada tahun 2011 dan angka rata-rata lama sekolah juga yang terus meningkat dari 7,8 pada tahun pada tahun 2004 menjadi 8,81 pada tahun 2011. Kemudian pengeluaran perkapita masyarakat juga terus mengalami kenaikan dari 575,1 padan tahun 2004 menjadi 610,71 pada tahun 2011. Tentu hal ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat terus mengalami

peningkatan setelah terjadinya pemekaran pada tahun 2004. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah berada pada katagori tinggi dan terus mengalami peningkatan setelah pemekaran.

Pengaruh Pemekaran Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bener Meriah tentang pengaruh variabel pemekaran (x) terhadap kualitas pelayanan publik (y) sebagaimana yang dituangkan pada perumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*, untuk menguji signifikansi koefisien korelasi pemekaran kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, dapat dihitung dengan uji t, selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari variabel pemekaran Kabupaten (x) terhadap variabel kualitas pelayanan publik (y), maka dalam penelitian ini menggunakan rumus koefisien determinan, Sementara itu yang terakhir untuk melihat bagaimana hubungan diantar kedua variabel tersebut, maka penelitian ini menggunakan analisa regresi linier sederhana.

a) Untuk mengetahui adakah pengaruh yang ditimbulkan dari pemekaran kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, maka digunakan rumus *Koefisien Korelasi Product Moment*<sup>6</sup> sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$
$$r_{xy} = \frac{100(248375) - (3850)(6326)}{\sqrt{[100(153672) - (14822500)][100(407412) - (40018276]}}$$
$$r_{xy} = 0,768$$

<sup>6</sup> Riduwan dan Sunarto, 2012, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 80.

Hasil perhitungan korelasi tersebut yaitu dengan 0,768 yang memiliki nilai positif, hal ini menjelaskan adanya hubungan antara pemekaran kabupaten dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya untuk mengetahui lemah kuatnya koefisien korelasi atau pengaruh yang dihasilkan, maka diperlukan interpretasi sebagaimana yang disebutkan Sugiyono<sup>7</sup>.

**Tabel 3**  
**Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Merujuk pada pedoman di atas, dapat dinyatakan bahwa koefisien korelasi dengan nilai 0,768 yang menjelaskan bahwa korelasi (tingkat hubungan) antara kedua variabel bernilai kuat. Selanjutnya untuk menguji apakah skor tersebut signifikan, maka dari hasil penghitungan korelasi sebelumnya perlu dikonsultasikan dengan nilai  $r$  tabel. Dari perhitungan korelasi di atas didapat nilai  $r$  hitung 0,768, bila dilihat dengan nilai  $r$  tabel untuk  $n=100$  dan tingkat kesalahan yang ditolerir 5%, maka  $r$  tabel adalah 0,195. Berarti  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, artinya hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Dengan demikian korelasi 0,768 menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan demikian hipotesis ( $H_a$ ) yaitu terdapat hubungan positif dan bernilai signifikan antara pemekaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah dapat diterima.

<sup>7</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 250.

- b) Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi pemekaran kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah terkait hubungan yang telah diperoleh itu berlaku dan mewakili seluruh populasi, maka perlu untuk di uji signifikansi yang dapat dihitung dengan uji t sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,768\sqrt{100-2}}{\sqrt{1-0,589824}}$$

$$t = 18,534$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji signifikansi didapatkan  $t_{hitung}$  adalah 18,534 dan jika dilihat pada  $t_{tabel}$  untuk kesalahan 5% dan  $n=100$  maka diperoleh  $t_{tabel}$  1,9861.

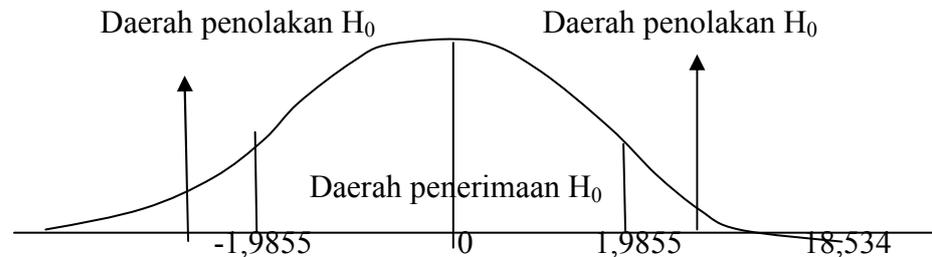
Berdasarkan ketentuan uji hipotesis:

1. Jika  $\rho \neq 0$  maka  $H_0$  (hipotesa nol) ditolak dan  $H_a$  (hipotesa alternatif) diterima, maka terdapat pengaruh signifikan antara pemekaran kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Jika  $\rho = 0$  maka  $H_0$  (hipotesa nol) diterima dan  $H_a$  (hipotesa alternatif) ditolak, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemekaran kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan membandingkan diantara  $t_{hitung}$  terhadap nilai 18,534 maka dapat diketahui bahwa  $\rho \neq 0$ , hasil ini memngartikan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dengan demikian hasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.



**Gambar 1: daerah keputusan dengan nilai kritis 1,9855**



Berdasarkan gambar diatas, nilai  $t_{hitung}$  ternyata terletak pada daerah penolakan  $H_0$ . Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pemekaran kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

- c) Untuk menghitung kontribusi pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah, maka digunakan rumus perhitungan koefisien determinan dengan cara mengkuadratkan hasil dari korelasi Product Moment lalu dikali 100%, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$D = (r_{xy})^2 \times 100\%$$

$$D = (0,768)^2 \times 100\%$$

$$D = 58,98\%$$

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Kesehatan di Kabupaten Bener Meriah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setelah terjadinya pemekaran, peningkatan tersebut berupa baiknya tingkat konsumsi masyarakat, tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai, tingkat penderita sakit yang rendah dan angka kematian bayi yang rendah pula, akan tetapi hal tersebut juga harus terus mengalami perbaikan dan peningkatan seperti penambahan

Dokter umum/spesialis dan tenaga medis lainnya, tentunya diikuti dengan peningkatan alat-alat medis yang lebih modern.

- 2) Pengetahuan di Kabupaten Bener Meriah juga terus mengalami peningkatan setelah pemekaran. Peningkatan yang paling menonjol yaitu pada infrastruktur sekolah dan jumlah tenaga pengajar yang memadai, selain itu tingkat partisipasi sekolah juga terus mengalami peningkatan.
- 3) Hidup layak masyarakat juga mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum terjadinya pemekaran. Kemampuan pengeluaran masyarakat juga meningkat, kepemilikan tanah yang tinggi membuat masyarakat lebih leluasa mengolah tanahnya. Akan tetapi tingkat kemiskinan dirasa masih perlu untuk di tekan agar pemekaran yang terjadi berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

BPS, 2019, Bener Meriah dalam Angka 2019

Creswell, John W, 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Riduwan dan Sunarto, 2012, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

UNDP, 1990, *Human Development Report*, New York : UNDP.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 *tentang* Kepariwisataaan.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2009 *tentang* Retribusi Izin Tempat Usaha

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2015 *tentang* Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah

### C. Artikel/Jurnal

Balkar, B., & M. G. Kasurka, 2015, *Decentralization as an Educational Planning Strategy in Turkish Education System*, International Journal of Education